BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis *trend* yang dilakukan menunjukan bahwa dari tahun 2006-2012 hanya pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang selalu mengalami peningkatan terus menerus, sementara untuk retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami fluktuasi selama periode pengamatan tersebut.
2. Hasil pengujian menunjukan bahwa terdapat pengaruh pendapatan asli daerah secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Gorontalo (Periode 2006-2012). Kinerja keuangan dalam hal ini diukur dengan menggunakan rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tingkat ketergantungan keuangan daerah karena semakin tinggi pendapatan asli daerah maka tingkat ketergantungan keuangan daerah akan semakin rendah. Namun

dengan semakin rendahnya tingkat ketergantungan keuangan daerah maka hal tersebut akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa hanya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang berpengaruh negatif terhadap tingkat ketergantungan keuangan daerah. Sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketergantungan keuangan daerah. Tingkat ketergantungan keuangan daerah merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah Kota Gorontalo. Semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah Kota Gorontalo, maka hal tersebut akan berdampak pada kinerja keuangannya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Gorontalo seharusnya dapat lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dengan menggali potensi-potensi yang ada di daerah dan memaksimalkannya serta mengeluarkan peraturan tentang tata cara pengelolaan

pendapatan asli daerah, terutama untuk pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah paling potensial. Meski begitu, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tetap perlu untuk dimaksimalkan juga. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan pendapatan transfer untuk mencapai tujuan otonomi daerah.

2. Bagi peneliti selanjutnya, harus dapat lebih memperluas lagi ruang lingkup penelitiannya baik mengenai pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah maupun mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu juga, peneliti selanjutnya dapat memperpanjang jangka waktu ataupun periode pelaporan yang akan diamati.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Verawaty. 2014. *Analisis Defisit Anggaran Pemerintah Daerah dan Dampaknya Terhadap Pinjaman Pemerintah Daerah di Kota Gorontalo.* Skripsi. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.

Azhar, MHD Karya Satya. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah.* Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara

Bastian, Indra. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia.* Yogyakarta: BPFE

Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah. (Rangkuman 7 UU, 30 PP dan 15 Permendagri).* Jakarta: Indeks

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2013. Data *Series* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Http://www.djpk.depkeu.go.id. diakses tanggal 29 Desember 2013)

Efferin, Sujoko. Stevanus Hadi Darmadji. Yuliawati Tan. 2008. *Metode Penelitian Akuntansi (Mengungkap Fenomena Dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Florida, Asha. 2006. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara.* Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3.* Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. Damayanti, Theresia. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen

Hidayat, Paidi, Pratomo dan Agus Harjito. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara.* Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 12 No. 3

Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Y*ogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajamen YKPN

Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga

Mahsun, Moh. Firma Sulistiyowati dan Andre Purwanugraha. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE

Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Jogyakarta: Andi

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

-------2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: ANDI

Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: Refika Aditama

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Alfabeta

Supangat, Andi. 2010. *Statistika (Dalam Kajian Deskriptif, Inferensial, Dan Nonparametrik*). Bandung: Kencana

Tuasikal, Askam. 2008. *Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.* Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol. 1, Nomor 2

Wibisono, Yusuf. 2009. *Metode Statistik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Wirartha, I Made. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi.* Yogyakarta: ANDI